

Peran Perempuan Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Moral Tradisional Pada Masyarakat Jepang

Sri Sudarsih
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro Semarang
E-mail: srisudarsih012005@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to explore traditional moral values in Japanese society that are able to survive and be implemented in everyday life in the modern era. In addition, it is able to shape the distinctive character of the Japanese, including the role of women who contribute to maintaining traditional moral values. This research is a qualitative research field of philosophy with the object of formal values and the material object is the development of women's position in Japanese society. The results achieved in the study: Japanese women played an important role in the history of the struggle until Japan achieved prosperity and glory until now. This is based on the reason that Japanese women are able to maintain and preserve traditional moral values that still exist through early education in the family environment. These values can shape the character of children from an early age in the family. A family with character brings logical consequences to the life of a community with character so that it affects the culture as a whole.

Keywords: women; society; Japanese; traditional moral values.

1. Pendahuluan

Keberlangsungan pembangunan suatu negara tidak lepas dari nilai-nilai yang tertanam dalam budaya mereka. Nilai-nilai dihayati dan diyakini untuk dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Terlepas dari upaya mewujudkan nilai-nilai tersebut secara evolusi maupun revolusi, yang paling mendasar adalah nilai tersebut tetap terjaga dan diyakini sebagai orientasi pembangunan.

Pembangunan di Jepang penuh dengan pergolakan panjang, namun Jepang tetap mampu menjaga nilai-nilai tradisi dalam membangun negara modern. Jepang menjadi negara modern, namun tetap berlandaskan pada kebudayaan tradisional khas Jepang. Nilai-nilai positif dari luar diserap, disesuaikan dengan nilai-nilai budaya tradisional sehingga memberikan ciri tersendiri bagi Jepang modern. Ciri ini memberikan keunggulan bagi budaya Jepang sehingga mampu bersaing bahkan melampaui negara modern lainnya.

Yoshino (tanpa tahun: 5) menyatakan bahwa Jepang modern berakar pada masyarakat tradisional di zaman Tokugawa (1600-1868). Jaman Tokugawa telah membentuk masyarakat feodal, tertutup, dan terbelakang. Namun nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan stabilitas masyarakat menjadi modal utama Jepang modern sehingga mampu melaju dengan sangat cepat. Pada Jaman ini Jepang mampu menanamkan kepada masyarakat mengenai kedisiplinan dan keteraturan. Kedua nilai ini menjadi kekuatan besar untuk mendorong ke arah modernisasi.

Tokoh yang tak pernah dilihat dari sisi pengorbanannya adalah perempuan Jepang. Pengorbanannya begitu besar dalam mengantarkan kejayaan Jepang hingga kini. Kaum yang terpinggirkan ini mampu menyangga ketidakadilan karena sistem budaya yang telah menanamkan ketidakadilan kepada kaum perempuan sepanjang masa hingga Jepang makmur.

Di sisi lain, nilai moral tradisional tetap mewarnai hingga orang Jepang memiliki sifat-sifat tersendiri. Nilai-nilai tradisional ini tertanam dalam kehidupan

sehari-hari hingga saat ini mewarnai kehidupan modern orang Jepang pada umumnya. Nilai-nilai tradisionan tersebut juga mewarnai manajemen modern perusahaan-perusahaan Jepang.

Penelitian ini berjudul *Peran Perempuan Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Moral Tradisional Pada Masyarakat Jepang*, sejauh yang peneliti ketahui belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang berkaitan dengan nilai moral pernah dilakukan oleh Sri Sudarsih berjudul *Dimensi Moral yang Tercermin dalam Sikap Empati bangsa Jepang*. Objek material berbeda yaitu sikap empati bangsa Jepang (Sudarsih, 2018: 51). Penelitian lain yang berkaitan dengan perempuan Jepang, oleh Indun Roosiani berjudul *Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Jepang*. Penelitian ini bersifat deskripsi mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat Jepang (Roosiani, 2017: 70).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bidang filsafat. Objek formal dalam penelitian ini adalah nilai moral, sedangkan objek materialnya adalah peran perempuan dalam masyarakat Jepang. Metode yang dipergunakan peneliti adalah deskripsi dan interpretasi.

Peneliti mendeskripsikan mengenai peran perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat Jepang, kemudian menginterpretasikan peran tersebut kaitannya dengan pelestarian nilai-nilai moral tradisional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Jepang

Ditilik dari sejarah kuno, Jepang pernah menganut paham matriakal dan ini menjadi salah satu Jepang masa lalu. Sebagai bukti tertulis dalam naskah-naskah kuno di Cina, menurut kepercayaan asal-usul garis kekaisaran adalah seorang Dewi Matahari.

Naskah tersebut memberitahukan kekaisaran perempuan itu ada sejak abad ke tiga dan bahkan sampai abad ke delapan. Pada masa itu perempuan memiliki kebebasan di istana Heian dan banyak menguasai kesusasteraan. Bahkan pada masa awal feodal kaum perempuan dapat mewarisi hak milik dan mempunyai peranan dalam sistem feodal (Rosidi, 1981:269). Ditegaskan oleh Reischauer (dalam Roosiani, 2017:71) bahwa Jepang pernah dipimpin seorang kaisar perempuan hingga awal masa pemerintahan Muromachi (1333-1573). Perempuan memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan sosial maupun politik.

Rosidi (1981:9) menyatakan Kaisar Perempuan Gemyo (661-721), dengan pusat pemerintahan di Propinsi Yamato membangun istana kaisar dengan nama Heijokyo yang di kemudian hari istana tersebut berganti nama menjadi Nara. Pada pusat pemerintahan ini telah memerintah tujuh orang kaisar selama 74 tahun. Dalam sejarah Jepang dikenal sebagai Zaman Nara, namun tidak disebutkan kaisar-kaisar tersebut apakah semua perempuan.

Kaisar diyakini merupakan garis keturunan dari Amaterasu yaitu Dewi Matahari. Disebut Dewi karena dewa yang mereka puja adalah perempuan. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa posisi perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam beberapa aspek. Roosiani (2017:72) menyebutkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki di beberapa bidang seperti bidang peternakan, perdagangan, dan perikanan yang saat itu sektor tersebut menguasai kehidupan masyarakat Jepang lebih dari 80 persen. Demikian juga kaitan dengan perkawinan, perempuan mempunyai derajat yang sama dengan kaum laki-laki karena mereka bekerja dalam kondisi yang sama.

Kondisi sosial politik ini dalam perkembangannya lambat laun berubah.

Perubahan ini terjadi seiring interaksi dengan Cina sejak awal sejarah Jepang. Pada akhirnya perubahan tersebut membawa pengaruh dalam pemerintahan maupun struktur masyarakatnya. Pengaruh Cina terhadap Jepang di bidang politik dirasakan ketika penduduk pulau yang bersifat kesukuan telah menerima segala pranata politik maupun sistem pertanian dari Cina. Secara langsung maupun tidak langsung, lama kelamaan saat isolasi yang dilakukan pada masa Tokugawa masih berlangsung, akhirnya menimbulkan kekuatan baru. Percampuran sistem politik yang rumit didasarkan pada ikatan kesetiaan pribadi dalam suatu aristokrasi militer dan peleburan kekuasaan umum hak-hak pribadi atas tanah (Reischauer, 1982: 69).

Pengaruh Filsafat Cina yang paling mendasar adalah ajaran Confusius dan agama Budha pada abad ke tujuh dan delapan. Ajaran Confusius, melalui tokoh besarnya Mencius pengaruhnya sangat kuat, terutama di masa pemerintahan Tokugawa. Juga ajaran Buddhisme Zen tentang pencerahan budi banyak dipraktikkan kaum pedagang dan pengrajin (Bellah, 1992: 2). Pada jaman ini Buddha dijadikan agama negara, sedangkan ajaran Confusius dijadikan ideologi negara (ONG, 2017:54).

Yoshino (tanpa tahun:8) menegaskan bahwa masa Tokugawa menekankan pada lima kunci hubungan, yang merupakan ajaran moral Konfusius, harus ditaati secara ketat dalam segala bentuk interaksi hubungan: kasih sayang antara ayah dan anak, penghormatan dan kesetiaan antara pembantu dan majikan, keserasian antara suami dan isteri, urutan terdahulu antar saudara yang lebih tua dan yang lebih muda, dan kepercayaan antar teman. Lebih tepatnya disusun berdasarkan pemerintahan feodal. Yamada (1985: 24) mengatakan berabad-abad Jepang diatur dengan sistem feodal, kaum bangsawan feodal dan samurai

memandang sangat rendah terhadap kaum pedagang oleh karenanya ia tidak boleh berdiri di hadapan para samurai. Mereka harus berlutut dan harus membungkukkan badan dalam-dalam. Para samurai kerap kali tidak menanyakan harga barang yang ditawarkan pedagang, tapi langsung dibayar.

Nilai-nilai tersebut oleh pemerintah Tokugawa dijadikan landasan untuk mengatur sistem sosial secara ketat. Landasan tersebut lebih bersifat pada tataran praktis dalam mengatur perilaku anggota masyarakat dari semua lapisan. Tokugawa telah membagi masyarakat dalam beberapa lapisan. Di antara lapisan itu adalah golongan samurai, petani, seniman, dan pedagang. Pelaksanakan nilai-nilai tersebut akan menciptakan masyarakat yang tentram dan damai (Yoshiono, tanpa tahun: 7-8). Tokugawa mampu menciptakan masyarakat yang damai tanpa gejolak hingga kurang lebih 250 tahun.

Pelaksanaan ajaran tersebut pada akhirnya menggeser peran perempuan dari peran dan fungsinya dalam struktur sosial dan politik. Pergeseran ini juga seiring dengan perubahan politik dan struktur masyarakat. Kaisar ingin mengontrol masyarakat dengan menerapkan lapisan-lapisan masyarakat. Kontrol pemerintah tersebut dengan memberikan hak-hak istimewa bagi golongan shogun/militer. Khususnya bagi kaum aristokrat militer mulai mendapatkan hak-hak istimewa dari pemerintah terutama pada masa pemerintah Heian (794-1192).

Pada jaman Ksatria sering terjadi perselisihan di antara kaum militer sehingga menimbulkan peperangan. Reischauer (1982: 270) menyebutkan bahwa kaum perempuan pada jaman Ksatria yang ternyata kurang mampu bertempur dibanding kaum pria berangsur-angsur digeser perannya. Lambat laun status perempuan tidak memiliki kedudukan

apapun di dalam struktur kaum feodal. Pada akhirnya kaum perempuan dikeluarkan dari struktur feodal. Perempuan hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki yang dikodratkan lebih kuat fisiknya. Namun di kalangan kaum petani, perempuan tetap dipandang penting dibanding dengan golongan aristokrat perempuan. Perempuan penting sebagai teman bekerja bersama dengan kaum pria di ladang-ladang pertanian. Kaum petani perempuan lebih memiliki kebebasan. Reischauer (1982: 270) menjelaskan bahwa di kalangan bangsawan era Tokugawa, perempuan sepenuhnya menjadi pelayan yang patuh bagi laki-laki.

Dalam perkawinan, status perempuan cenderung diabaikan hak-haknya. Fukutake (dalam Roosiani, 2017:72) menyatakan bahwa perkawinan bukanlah merupakan permulaan sebuah keluarga baru, tetapi perempuan yang datang sebagai anggota baru dalam keluarga suaminya. Secara adat, dalam keluarga petani di Jepang memiliki paham keluarga baru tersebut pada akhirnya akan mewarisi ladang. Maka mereka berumah tangga menyatu dengan keluarga besar suami yaitu hidup bersama dengan keluarga yang lebih tua dan hidup bersama dengan orang tua, kakek, dan nenek dari suaminya. Keluarga dengan sistem kekerabatan *ie* yang masih ada dan dijalankan di pedesaan. Keluarga ini menganut paham keluarga sebagai entitas yang berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi bersifat patrikal. Sistem ini menjalankan keharmonisan dalam seluruh hubungan anggota keluarga. Aspirasi individu diselaraskan dengan kepentingan bersama dalam upaya mempertahankan harmoni tadi. Perlakuan terhadap perempuan calon pengantin tidak ada persamaan hak dengan calon pengantin laki-laki. Pertemuan antara kedua mempelai tidak memberikan hak bagi perempuan untuk mengenal calon suaminya atau menyampaikan perasaannya tentang

pelaksanaan perkawinannya. Ia hanya diperlihatkan saja kepada calon pasangannya.

Fukutake (dalam Roosiani, 2017: 73) lebih lanjut mengatakan setelah perkawinan terjadi, jarang sekali calon pengantin langsung didaftarkan ke dalam keluarga suaminya. Apabila ia sudah berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga suaminya, dengan melayani mertuanya atau setelah melahirkan anak, barulah status perkawinannya dianggap sah. Kelahiran anak merupakan langkah awal untuk menjamin keberlangsungan keluarga sistem *ie*.

Berbeda dengan sistem keluarga inti batih, yang membangun keluarga berdasarkan kesepakatan kedua pasangan yaitu saling mencintai. Perempuan memiliki hak yang sama dengan pasangan hidupnya. Keluarga batih terbentuk karena tuntutan dan perkembangan jaman.

Setelah Jepang lebih maju, sektor perekonomian bergeser dari sektor pertanian ke industri, banyak kaum muda terpelajar lebih cenderung memilih bekerja di industri yang mulai tumbuh di perkotaan. Mereka mulai bekerja di sektor industri yang memang dari sisi pendapatan lebih menjanjikan dari pada bekerja di sektor pertanian. Pada saat ini terjadilah urbanisasi secara besar-besaran.

Kaum muda terpelajar yang bekerja akhirnya bertemu jodohnya. Mereka memilih membangun rumah tangga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Perkawinan didasarkan cinta dan kesepakatan kedua pasangan. Realitas ini berbeda jauh dengan perkawinan sebelum-sebelumnya di mana perempuan tidak bisa memilih pasangan hidupnya. Perkawinan dalam membangun keluarga ini sudah mulai menggeser bentuk perkawinan sebagaimana dalam keluarga *ie*. Kaum perempuan lebih dihargai dalam menentukan pasangan hidupnya. Tugas-

tugas rumah tanggapun dibagi sesuai kesepakatan.

Peran perempuan yang tak tergantikan adalah sebagai penerus keluarganya. Maka tidak berlebihan jika ada rumusan kalimat “nasib bangsa ada di tangan perempuan”. Peran perempuan yang sangat mendasar lainnya adalah dalam dunia pertanian. Pentingnya wanita bahkan disimbulkan secara positif dalam budaya tradisional. Perempuan adalah lambang kesuburan.

Pada masa Tokugawa, masyarakat dibagi menjadi empat golongan, petani menempati kelas kedua setelah kaum samurai, kelas pedagang dan tukang berada pada kelas di bawahnya. Pada masa ini penduduknya lebih banyak tinggal di pedesaan, dengan pertanian sebagai sumber utama keberlangsungan perekonomian. Bentuk keluarga masih banyak yang menganut sistem *ie*, yaitu bentuk keluarga tradisional. Mengolah lahan pertanian menjadi *soko guru* keberlangsungan ekonomi keluarga tradisional. Sedemikian pentingnya pertanian, dalam perjodohan antara dua keluarga tidak berdasarkan cinta, tetapi secara budaya, perjodohan berarti bertambahnya tenaga baru dalam keluarga dalam mengupayakan ladang pertanian. Perempuan dipandang sedemikian rupa sehingga diperlakukan sebagai tenaga kerja.

Kedudukan perempuan akan memiliki fungsi strategis ketika perjodohan tersebut sudah memiliki anak. Peran perempuan sangat penting sebagai pendidik dan pengasuh anak mulai nyata. Anak mulai dididik dan dikenalkan apa yang boleh dan apa yang wajib dilakukan. Keberadaan seorang anak juga menjadi penghibur dan motivasi bagi ibunya. Prinsip-prinsip hubungan dalam keluarga yang terdiri dari lima prinsip hubungan menjadi dasar mendidik anak.

3.2. Peran Perempuan Kaitan Dengan Nilai-Nilai Moral Tradisional

Istilah nilai berasal dari Bahasa Latin *valere* memiliki arti berguna, mampu akan, berdaya. Nilai berarti juga harkat dan keistimewaan. Harkat adalah kualitas sesuatu yang menjadi menyebabkan sesuatu itu bermanfaat, diinginkan, atau menjadi objek kepentingan. Keistimewaan berarti nilai adalah sesuatu yang dihargai sebagai suatu kebaikan (Bagus, 2005: 713). Bertens (2011:149-158) menjelaskan nilai merupakan sesuatu yang baik sehingga menyenangkan, disukai, dan diinginkan. Nilai juga berlaku untuk nilai moral. Nilai mempunyai bobot moral apabila dikaitkan dengan tingkah laku moral. Scheler (1973:66-67) menegaskan bahwa nilai adalah kualitas *a priori* bukan realitas empiris. Nilai kejujuran misalnya memiliki sifat tindakan yang jujur. Lebih lanjut Scheler menyatakan bahwa nilai tidak identik dengan sesuatu yang bernilai.

Sedangkan pengertian moral menurut Poespoprodjo (dalam Sri Sudarsih, 2018 : 53-54) adalah moralitas yang merupakan kualitas yang tercermin dalam perilaku manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau buruk.

Jadi moral berarti moral berarti hal yang menentukan baik buruk perbuatan seseorang. Sedangkan tradisional adalah hal yang sudah ada sejak dahulu kala dan menyangkut kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Sedangkan filsafat moral seperti yang dinyatakan Rachels (2004 :17) adalah usaha dalam rangka mensistematisasikan pengetahuan mengenai hakikat moralitas dan sesuatu yang dituntut dari individu, meminjam istilah Sokrates yaitu ‘bagaimana seharusnya kita hidup’ dan alasan-alasannya.

Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia juga memiliki prinsip-prinsip dalam tradisi dari ajaran nenek moyang, seperti gotong royong, konsep persaudaraan, tepa selira, dan kepedulian. Indonesia juga

memiliki ideologi Pancasila. Pancasila digali dari adat, tradisi, religi dan kebudayaan. Prinsip-prinsip yang ada di dalamnya juga menjadi dasar pembentukan akhlak dan kepribadian bangsa. Dalam rumusan lainnya, konsep empat tabiat saleh juga diajarkan yaitu kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan hati (Notonagoro, 1987:97-99). Pertanyaannya adalah apakah ajaran tradisi tersebut sudah dijalankan dan mampu membentuk karakter pribadi seseorang?

Di Jepang tradisi tetap dipelihara sedemikian rupa sehingga mampu membentuk karakter manusia khas Jepang. Kesenambungan dalam mentransfer nilai-nilai moral dalam tradisi tetap tertanam dalam pendidikan keluarga. Kesetiaan, kebersamaan, disiplin, teliti, dan konsisten memperbaiki kesalahan secara konsisten senantiasa dilakukan. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi modal Jepang cepat maju.

Saat Meiji Restorasi tahun 1868 merebut kekuasaan dari Tokugawa, kemudian mengembangkan negara modern, tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai tradisi. Justru Meiji mengembangkan negara yang didasarkan pada negara keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga tradisional yang kemudian direinterpretasikan untuk mewujudkan sebuah negara. Sistem kekerabatan dalam keluarga tradisional dijadikan model dalam membangun negara keluarga. Negara merupakan bentuk dari keluarga besar. Hubungan ayah dengan anak direinterpretasikan hubungan pemimpin dengan rakyat. Hubungan kesetiaan abdi dengan majikan disejajarkan antara kaisar dengan militer, hubungan keserasian antara suami dan istri disejajarkan dengan hubungan kemasyarakatan, hubungan kepercayaan antar teman disejajarkan dengan saling percaya sesama warga dan tidak saling mencurigai.

Nilai-nilai semacam ini kaitannya dengan peran perempuan sebagai pendidik di dalam rumah tangga sangat menentukan

keberhasilan anak dalam memahaminya. Namun perempuan tetap memiliki peran mendasar dalam tataran rumah tangga. Nilai-nilai tradisi ini tetap melekat dalam keluarga khususnya kepada anak. Fungsi utama perempuan adalah mendidik anak, mengurus keseharian rumah tangga, bahkan membantu juga di dunia pertanian bagi kaum tani. Perempuan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. Peran mereka tak tergantikan dalam melahirkan generasi penerus, tetapi faktor budaya masih tetap meminggirkan kaum perempuan tak terhindarkan. Mereka ini cenderung menerima sistem yang berlaku dalam adat dan tradisi. Ballon (1985:128-137) memaparkan perbedaan gaji karyawan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki memiliki gaji lebih tinggi dari pada perempuan sekalipun masa kerja dan jenis kerjanya sama. Dan masih ada beberapa tunjangan untuk karyawan laki-laki yang tidak diberikan kepada karyawan perempuan. Misalnya bagi karyawan laki-laki mendapatkan tunjangan keluarga, isteri, dan anak-anaknya, sedangkan karyawan perempuan tidak mendapatkannya.

Status wanita dalam masyarakat Jepang mengalami perbaikan signifikan setelah Perang Dunia II. Undang-undang dasar tahun 1946, pasal 14 menyatakan bahwa “ Semua orang sama di hadapan hukum dan tidak ada diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi, atau sosial berdasarkan ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau keturunan,”. Atas ketentuan UUD tersebut maka perundang-undangan mengenai pendidikan maupun perburuhan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan UUD tersebut, dan merevisinya dengan prinsip persamaan tanpa membedakan jenis kelamin (Japan Echo Inc, tanpa tahun :81)

Reischauer (1982:275) menyatakan kedudukan perempuan Jepang sebenarnya lebih tinggi ketimbang dari yang sering nampak. Seperti sejarah Jepang yang pada tahap awal menganut paham patriarkal, dan unsur-unsur ini berlangsung terus selama

ini, walaupun nampak dominan peran laki-laki sebagaimana pengaruh dari ajaran Confusius. Adalah petunjuk harapan di abad tengah, bahwa kaum perempuan sedikitpun tak kurang kekuatan dan keberaniannya dari laki-laki. Di dalam jaman modern daya dan kekuatan psikologis lebih ketimbang pria, dan Jepang modern sudah bisa dipastikan didominasi kaum perempuan.

Pada kesempatan lain Reischauer dengan teori psiko analisis Freud, seorang bapak yang berkuasa di dalam rumah tangga hampir tidak terjadi di Jepang. Pada saat kecil anak laki yang dekat dengan ibunya akan merasa nyaman. Perasaan ini terbawa hingga dewasa (Reischauer, 1982: 277-278). Inilah tuntutan kepada perempuan dalam lingkungan rumah tangga. Di satu pihak diharapkan memiliki watak yang kuat, menjaga ketenteraman dan kenyamanan seluruh anggota keluarga, tetapi di sisi lain di lingkungan masyarakat luas, peran dan fungsinya direndahkan. Kedudukan perempuan sejak Jepang awal selalu dalam posisi rendah baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Namun peran perempuan sebagai pendidik anak dan penerus keturunan tak terbantahkan. Dalam keluarga Jepang tradisional tugas perempuan adalah menanamkan nilai-nilai moral pada anak agar mereka memiliki akhlak mulai dan terhormat.

Bagi keluarga Jepang seseorang yang lahir dalam keluarga besar *ie*, secara langsung dia menjadi anggota keluarga berdasarkan *shusse no kankei* yaitu hubungan keluarga berdasarkan kelahiran. Dia pertama kali diajarkan adanya norma-norma keluarga. Di samping mendapatkan status sosial, dia dididik dan diajarkan mengenal sistem hirarki dan kebudayaan yang mereka anut, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Misalnya prinsip keluarga *ie* mengenal adanya prinsip bahwa seseorang harus menempatkan diri sesuai dengan hirarki senior dan junior. Sedangkan prinsip rasa

memiliki serta rasa kesadaran untuk mempertahankan kehormatan keluarga terhadap pandangan orang luar, ini tugas perempuan.

Nilai-nilai moral tradisional yang ditanamkan dalam pendidikan keluarga bersumber pada lima prinsip hubungan keluarga. Setiap orang mengambil peran sesuai dengan posisinya. Unsur-unsur nilai tersebut adalah adalah rasa malu, disiplin diri, kesetiaan, kasih sayang, selalu memperbaiki kesalahan, dan menjunjung tinggi kebersamaan.

4. KESIMPULAN

Perempuan Jepang mengalami pasang surut dalam peran dan fungsinya dalam membingkai nilai-nilai moral Jepang, sejak Jaman Jepang kuno, tradisional hingga modern. Perempuan sebagai kaum yang terpinggirkan tetap mampu membawa perubahan demi perubahan dibingkai dalam bentuk kesabaran, kesetiaan, dan konsistensi. Pendidikan secara konsisten akan mengubah persepsi terhadap perempuan.

Konsistensi menjadi kunci keberhasilan dalam membawa perubahan yang senantiasa berpegang pada nilai-nilai tradisi yang kemudian dapat membentuk karakter bangsa. Akhirnya menjadi modal besar dalam membawa perubahan kepada Jepang modern.

Pelestarian nilai-nilai tradisi dan kebudayaan sendiri mampu membawa keunggulan suatu bangsa. Bagaimana hal ini dapat dilakukan Bangsa Jepang tentu bukan hal yang mudah. Penting kiranya bangsa lain dapat untuk belajar dari Bangsa Jepang.

Daftar Pustaka

- Balon, J. Robert. 1983. *Sistem Penggajian Jepang dalam Manajemen Jepang*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.
- Bagus, Loren. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

- Bellah, Robert. N. 1992. *Religi Tokugawa, Akar-akar Budaya Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notonagoro, 2007. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Cetakan ke-10. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Japan Echo Inc. tanpa tahun. *Jepang Dewasa Ini*. edisi asli dalam bahasa Inggris tahun 1989 oleh International Society for Educational Information, Inc, Room 504, Royal Wakaba, 1-22 Wakaba. Sinjuku-ku, Tokyo. Japan.
- ONG, Susy. 2017. *Seikatsu Kaizen: Reformasi Pola Hidup Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Rachels, James. 2004. *Filsafat Moral*. Diterjemahkan oleh A. Sudiarja dari Judul asli *The Elements of Moral Philosophy*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Reischauer, Edwin O. 1982. *Manusia Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Roosiani, Indun. 2017. *Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Jepang*. Jurnal Wahana Volume 1 No. 13.
- Rosidi, Ajib. 1981. *Mengenal Jepang*, cetakan ke-2. Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya.
- Scheler, Max. 1973. *Formalism in Ethics and Non-Formal of Values, A New Attempt towards the Foundation*. Evanston: Northwestern University Press.
- Sudarsih, Sri. 2018. *Dimensi Moral yang Tercermin Dalam Sikap Empati Bangsa Jepang*. Jurnal Kiryoku Volume 2 No. 1 Tahun 2018. Halaman 51-57.
- Yamada, Tadayoshi. 1983, *Beberapa Ciri Khas Praktek Bisnis Jepang*, dalam *Managemen Jepang*. Penyunting Marbun. B. N. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Yoshino, My. *Sistem Manajemen Jepang*. Cetakan ke -10. Diterjemahkan oleh Drs. Tatang Gandasasmita. Bandung: Iqra.